

**Korupsi Sistemik sebagai Produk Struktur Sosial: Telaah
Sosiologi Politik dan Teologi terhadap Disintegrasi Kepercayaan
Publik di Indonesia**

Iwan Sumaria Gaurifa
Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran
Email: iwangaurifa368@gmail.com

Abstract

Systemic corruption in Indonesia can no longer be understood merely as individual misconduct, but rather as a structural phenomenon rooted in power relations, political culture, and institutional weaknesses that are deeply intertwined, leading to the disintegration of public trust in state institutions. This study aims to analyze systemic corruption from the perspective of political sociology, examine its impact on public trust, and evaluate it through a theological approach that emphasizes the values of justice, integrity, and stewardship. The research employs a systematic literature review (SLR) approach, utilizing literature-based data collection and content analysis of relevant academic sources. The findings indicate that systemic corruption emerges from the interaction between unequal social structures, weak institutional accountability, and patronage culture, and significantly contributes to the decline of political legitimacy and public participation. From a theological perspective, corruption is understood as a moral and spiritual violation that calls for value transformation in governance practices. This study contributes to the development of an integrative conceptual framework that combines political sociology and theology as a foundation for formulating transformative strategies to restore public trust.

Keywords: *Systemic Corruption; Social Structure; Political Sociology; Public Trust*

Abstrak

Korupsi sistemik di Indonesia tidak lagi dapat dipahami sebagai penyimpangan individual, melainkan sebagai fenomena struktural yang berakar pada relasi kekuasaan, budaya politik, dan kelemahan institusional yang saling berkelindan, serta berdampak pada disintegrasi kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korupsi sistemik dalam perspektif sosiologi politik, mengkaji dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta mengevaluasinya melalui pendekatan teologis yang menekankan nilai keadilan, integritas, dan amanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR) dengan teknik pengumpulan data berbasis kajian pustaka dan analisis isi terhadap literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi sistemik terbentuk melalui interaksi antara ketimpangan struktur sosial, lemahnya akuntabilitas institusional, dan budaya patronase, serta berkontribusi signifikan terhadap penurunan legitimasi dan partisipasi publik. Dari perspektif teologis, korupsi dipahami sebagai pelanggaran moral-spiritual yang menuntut transformasi nilai dalam tata kelola

kekuasaan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual integratif antara sosiologi politik dan teologi sebagai dasar dalam merumuskan strategi transformatif untuk memulihkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Korupsi Sistemik; Struktur Sosial; Sosiologi Politik; Kepercayaan Publik

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena global yang secara konsisten dipandang sebagai salah satu hambatan utama bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, terutama di negara berkembang, karena praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan sosial dan institusi publik.¹ Dalam konteks Indonesia, korupsi telah berkembang dari sekadar penyimpangan individual menjadi fenomena yang bersifat sistemik, melibatkan jaringan kekuasaan, birokrasi, dan aktor politik yang saling terkait, sehingga menciptakan pola yang terinstitusionalisasi dalam praktik pemerintahan.² Data mutakhir menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara, yang mencerminkan masih lemahnya reformasi institusional dan tata kelola pemerintahan.³ Kondisi ini berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi di masyarakat.⁴ Lebih jauh, korupsi tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga menggerus legitimasi politik dan kepercayaan publik terhadap institusi negara, sehingga memicu apatisme sosial dan melemahnya partisipasi demokratis.⁵

¹ Dewi Asri Yustia and Firdaus Arifin, "Bureaucratic Reform as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 2023): 2166196, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2166196>.

² Audaraziq Ismail, Febby Mutiara Nelson, and Basuki Rekso Wibowo, "ABUSE OF POWER: UNDERSTANDING THE DYNAMICS OF CORRUPTION BY INDONESIAN GOVERNMENT AUTHORITIES," *Lex Localis - Journal of Local Self-Government* 23, no. 10 (July 2025): 595–604, <https://doi.org/10.52152/800756>.

³ Salma, "Indonesia's Corruption Perception Index Remains Low, UGM Expert Cites Weak Institutional Reform and Deep-Rooted Corruption Culture," *Universitas Gadjah Mada*, February 17, 2025, <https://ugm.ac.id/en/news/indonesias-corruption-perception-index-remains-low-ugm-expert-cites-weak-institutional-reform-and-deep-rooted-corruption-culture/>.

⁴ Firda Nurjihan Salsabila et al., "DAMPAK SISTEMIK KORUPSI TERHADAP PEREKONOMIAN, SISTEM PENDIDIKAN, DAN PEMBAGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS KOMPREHENSIF," *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 1, no. 6 (November 2024): 210–20, <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2917>.

⁵ Derwin Tambunan, "Indonesia under Threat: The Danger of Corruption to Political Legitimacy," *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 1 (March 2023): 112–40, <https://doi.org/10.1177/20578911221124965>.

Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui reformasi hukum, pembentukan lembaga antikorupsi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, fenomena korupsi sistemik masih tetap bertahan dan bahkan bertransformasi dalam bentuk yang lebih kompleks.⁶ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan kebijakan yang bersifat normatif dengan realitas praktik korupsi yang berakar pada struktur sosial dan budaya politik yang lebih dalam.⁷ Sejumlah kajian menunjukkan bahwa korupsi tidak dapat dipahami secara parsial sebagai tindakan individu, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara kelemahan institusional, budaya patronase, dan relasi kekuasaan yang tidak seimbang.⁸ Selain itu, masih terbatasnya pendekatan interdisipliner dalam mengkaji korupsi—khususnya integrasi antara perspektif sosiologi politik dan teologi—menjadi celah akademik yang signifikan, mengingat dimensi moral dan spiritual dari korupsi sering kali diabaikan dalam analisis kebijakan publik.⁹ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami akar struktural sekaligus dimensi normatif dari praktik korupsi sistemik di Indonesia.

Dalam kerangka sosiologi politik, korupsi sistemik dapat dijelaskan sebagai manifestasi dari ketimpangan struktur kekuasaan dan distribusi sumber daya yang memungkinkan elit untuk mengeksploitasi posisi mereka demi kepentingan pribadi, sebagaimana tercermin dalam praktik penyalahgunaan kewenangan di berbagai sektor pemerintahan.¹⁰ Perspektif ini diperkuat oleh teori agensi yang menyoroti adanya konflik kepentingan antara pejabat publik (agent) dan masyarakat (principal), terutama ketika mekanisme pengawasan dan akuntabilitas tidak berjalan secara efektif.¹¹ Di sisi lain, pendekatan teologis memandang korupsi sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental seperti keadilan, amanah, dan integritas, yang tidak hanya

⁶ Ade Paranata, "A Systematic Literature Review of Anti-Corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia," *Public Organization Review* 25, no. 3 (September 2025): 1181–214, <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>.

⁷ Polrendyo Polrendyo, Ika Devy Pramudiana, and Eny Haryati, "How 'Good' Governance in Indonesia? A Systematic Literature Review," *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 5 (September 2025): 63–86, <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i5.582>.

⁸ Wa Ode Intan Kurniawati and Saprudin Saprudin, "Ethics in Indonesian Government Bureaucracy: Theoretical Foundations, Historical Evolution, and Contemporary Case Studies," *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study* 6, no. 1 (March 2025): 21–29, <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v6i1.588>.

⁹ Rana Sharjeel Akhtar et al., *Governance Challenges and the Impact of Corruption on Socio-Economic Stability: A Literature Study in Developing Countries*, 42, no. 2 (2025).

¹⁰ Moh Ali Wafa, Sudirman Abbas, and Umar Sulaiman, "The Law and Impact of Political Corruption on Community Trust In Political Parties In Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (March 2021), <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.20140>.

¹¹ Dyah Setyaningrum, Ratna Wardhani, and A. Syakhroza, "Good Public Governance, Corruption and Public Service Quality: Indonesia Evidence," *International Journal of Applied Business and Economic Research* 15 (January 2017): 327–38.

berdampak pada hubungan sosial, tetapi juga pada dimensi etika dan spiritual manusia.¹² Integrasi antara kedua perspektif ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap fenomena korupsi, sekaligus membuka ruang bagi formulasi solusi yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga transformasional secara moral dan kultural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korupsi sistemik sebagai produk dari struktur sosial dalam perspektif sosiologi politik, mengkaji dampaknya terhadap disintegrasi kepercayaan publik di Indonesia, serta mengevaluasi fenomena tersebut melalui pendekatan teologis yang menekankan nilai keadilan, integritas, dan amanah. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana korupsi sistemik terbentuk dan beroperasi dalam kerangka struktur sosial dan kelembagaan, bagaimana praktik tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara, serta bagaimana perspektif teologis dapat memberikan kritik sekaligus kontribusi solutif terhadap fenomena tersebut. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa semakin kuat praktik korupsi sistemik yang ditopang oleh struktur sosial dan kelemahan institusional, maka semakin tinggi tingkat disintegrasi kepercayaan publik; sebaliknya, integrasi nilai-nilai teologis dalam tata kelola pemerintahan berpotensi memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada upaya mengembangkan kerangka konseptual integratif yang menggabungkan analisis sosiologi politik dengan perspektif teologi dalam memahami korupsi sistemik, yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah dalam literatur akademik. Penelitian ini juga menawarkan pendekatan baru dalam melihat korupsi tidak hanya sebagai masalah struktural dan kelembagaan, tetapi juga sebagai krisis moral dan spiritual yang memerlukan intervensi multidimensional. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam studi korupsi, khususnya dalam konteks Indonesia, serta memberikan kontribusi praktis dalam merumuskan strategi pemulihan kepercayaan publik melalui integrasi reformasi struktural dan transformasi nilai-nilai etis dalam tata kelola pemerintahan

¹² Neng Nur Annisa and Maria Margarita R. Lavidés, “The Impact of Corruption on Economic Stability and Community Life in Indonesia,” *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik* 4, no. 1 (April 2025): 1–10, <https://doi.org/10.15575/jpkp.v4i1.44798>.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai strategi utama untuk mengkaji secara komprehensif fenomena korupsi sistemik dalam perspektif sosiologi politik dan teologi. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan penelitian terdahulu secara sistematis dan transparan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena kompleks.¹³ Dalam konteks penelitian ini, SLR digunakan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis dan empiris yang relevan dengan korupsi sistemik, kepercayaan publik, serta pendekatan teologis, sehingga menghasilkan kerangka konseptual yang holistik dan interdisipliner.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berbasis data sekunder, yaitu literatur ilmiah yang terdiri atas artikel jurnal bereputasi, prosiding ilmiah, dan publikasi akademik open-access yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan mencakup kajian dalam bidang sosiologi politik, ilmu pemerintahan, studi korupsi, serta teologi sosial. Penggunaan data sekunder dalam bentuk literatur ilmiah memungkinkan penelitian ini untuk membangun argumentasi yang kuat berbasis temuan empiris dan konseptual yang telah teruji dalam komunitas akademik.¹⁴ Selain itu, pendekatan ini juga sesuai dengan karakter penelitian konseptual yang berfokus pada pengembangan teori dan sintesis gagasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui strategi pencarian literatur sistematis dengan memanfaatkan basis data akademik seperti Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal open-access lainnya. Proses pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci seperti “*systemic corruption*”, “*political sociology*”, “*public trust*”, “*theology of justice*”, dan “*governance corruption*”. Tahapan pencarian meliputi identifikasi awal literatur, penyaringan berdasarkan relevansi judul dan abstrak, serta seleksi akhir berdasarkan kesesuaian isi dengan fokus penelitian. Proses ini mengikuti prinsip transparansi dan replikasi dalam penelitian literatur, sehingga dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan.¹⁵

¹³ Ivica Matić, “Guidelines for Writing and Publishing a Scientific Paper,” *Cardiologia Croatica* 17, nos. 9–10 (November 2022): 352–352, <https://doi.org/10.15836/ccar2022.352>.

¹⁴ Charles N. Cornell, “Please Say It Clearly: A Reflection on Proper Style of Scientific Reporting,” *HSS Journal®: The Musculoskeletal Journal of Hospital for Special Surgery* 17, no. 2 (July 2021): 128–29, <https://doi.org/10.1177/15563316211005401>.

¹⁵ Maha A. Sayal, “How Can I Write a Discussion That Is Effective?,” *Journal of Language and Linguistics in Society*, no. 35 (July 2023): 7–10, <https://doi.org/10.55529/jlls.35.7.10>.

Kriteria inklusi dan eksklusi diterapkan untuk memastikan kualitas dan relevansi literatur yang digunakan. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (prioritas), (2) publikasi open-access, (3) relevansi langsung dengan topik korupsi sistemik, kepercayaan publik, atau perspektif teologis, serta (4) artikel yang memiliki kejelasan metodologis dan argumentasi ilmiah. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup: (1) artikel yang tidak melalui proses peer-review, (2) publikasi yang tidak memiliki akses penuh (closed access), dan (3) literatur yang tidak memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Penerapan kriteria ini penting untuk menjaga kualitas sintesis literatur serta menghindari bias dalam pemilihan sumber.¹⁶

Unit analisis dalam penelitian ini adalah konsep, teori, dan temuan empiris yang terdapat dalam literatur terpilih, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara struktur sosial, praktik korupsi sistemik, dan kepercayaan publik. Analisis juga mencakup interpretasi teks-teks teologis melalui pendekatan eksegesis serta analisis linguistik (leksikal, sintaksis, dan semantik) untuk memahami makna nilai-nilai seperti keadilan, integritas, dan amanah dalam konteks sosial-politik. Dengan demikian, unit analisis tidak berupa individu atau kelompok sosial secara langsung, melainkan konstruksi konseptual yang direpresentasikan dalam literatur ilmiah.

Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) yang dikombinasikan dengan sintesis naratif. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: (1) pengkodean tema utama dari literatur yang dikaji, (2) kategorisasi berdasarkan pendekatan teoretis (sosiologi politik dan teologi), (3) identifikasi pola hubungan antar konsep, serta (4) penyusunan sintesis konseptual yang terintegrasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengekstraksi makna mendalam dari berbagai sumber literatur dan menghubungkannya dalam kerangka analisis yang koheren (Zashikhina, 2023). Dalam proses ini, peneliti juga memperhatikan prinsip logika ilmiah dan konsistensi argumentasi untuk memastikan bahwa hasil analisis memiliki validitas konseptual yang kuat.

¹⁶ I. M. Zashikhina and O. V. Pechinkina, "Scientific Publications Format IMRaD for Social and Humanities Research: A Chance to Be Heard," *Vysshee Obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia* 31, no. 10 (October 2022): 150–68, <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-10-150-168>.

C. HASIL & PEMBAHASAN

Dalam sintesis literatur teologis, ditemukan bahwa korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum atau administratif, melainkan sebagai deviasi moral-spiritual yang berakar pada kegagalan manusia dalam menjalankan mandat etis sebagai pengelola (steward) atas kekuasaan publik. Literatur menunjukkan bahwa dalam kerangka teologi, khususnya dalam tradisi Abrahamik, korupsi secara eksplisit dikategorikan sebagai bentuk *khianat terhadap amanah (trust betrayal)* yang memiliki implikasi tidak hanya sosial, tetapi juga transendental.¹⁷ Konsep amanah dalam hal ini tidak sekadar dimaknai sebagai tanggung jawab administratif, tetapi sebagai kewajiban moral yang melekat pada relasi antara manusia, masyarakat, dan Tuhan.

Lebih lanjut, konsep keadilan (justice/'adl) dalam perspektif teologis diposisikan sebagai prinsip fundamental dalam tata kelola kekuasaan. Literatur menunjukkan bahwa praktik korupsi merupakan bentuk distorsi terhadap prinsip keadilan distributif dan prosedural, yang berdampak pada ketimpangan sosial serta marginalisasi kelompok rentan.¹⁸ Dalam kerangka ini, korupsi tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga melanggar tatanan moral kosmik (moral order) yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan dalam perspektif teologi.

Selain itu, konsep stewardship (pengelolaan sebagai amanah) menunjukkan bahwa kekuasaan publik bukanlah hak kepemilikan absolut, melainkan mandat yang harus dikelola untuk kepentingan bersama. Literatur menegaskan bahwa kegagalan dalam menjalankan stewardship akan menghasilkan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang sistemik, karena aktor tidak lagi memandang dirinya sebagai pelayan publik, melainkan sebagai pemilik sumber daya.¹⁹ Dalam konteks ini, korupsi dipahami sebagai bentuk pergeseran ontologis dari “servant leadership” menuju “exploitative authority”.

Literatur juga menunjukkan bahwa pendekatan teologis memiliki dimensi transformasional, bukan sekadar normatif. Artinya, nilai-nilai seperti keadilan, integritas, dan amanah tidak hanya berfungsi sebagai standar evaluatif, tetapi

¹⁷ Md. Yasir Arafat Arman and Mohammad Faruq Azam, “Combating Corruption in Bangladesh: An Unexplored Framework in Anti-Corruption Strategies,” *Journal of Arts, Humanities and Social Science* 2, no. 1 (April 2025): 194–203, <https://doi.org/10.69739/jahss.v2i1.463>.

¹⁸ Amyna Naphizah P. Masorong, “ISLAMIC ETHICAL PRINCIPLES AND ACCOUNTABILITY IN GOVERNANCE,” *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance* 7, no. 21 (March 2025): 21–34, <https://doi.org/10.35631/AIJBAF.721002>.

¹⁹ Willy Koskey, James Nkansah Obrempong, and Sicily M. Muriithi, “An Examination of Theology’s Influence on Societal, Political, and Economic Realities,” *Journal of Sociology, Psychology and Religious* 5, no. 3 (June 2025): 19–33, <https://doi.org/10.70619/vol5iss3pp19-33>.

juga sebagai instrumen perubahan sosial dan institusional.²⁰ Dalam konteks ini, integrasi nilai teologis dalam sistem tata kelola—misalnya melalui pendidikan etika, reformasi budaya organisasi, dan internalisasi nilai spiritual—diidentifikasi sebagai salah satu pola yang muncul dalam literatur sebagai upaya pencegahan korupsi.

Temuan lain menunjukkan bahwa dalam kajian teologi pembebasan, korupsi diposisikan sebagai bentuk penindasan struktural (*structural oppression*) yang memperkuat ketidakadilan sosial dan memperlemah kelompok marginal. Perspektif ini menekankan bahwa korupsi bukan hanya masalah moral individu, tetapi merupakan bagian dari struktur dosa sosial (*social sin*) yang harus dilawan melalui perubahan sistemik.²¹ Dengan demikian, pendekatan teologis tidak hanya bersifat etis, tetapi juga kritis terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil.

Selain itu, dalam konteks empiris Indonesia, beberapa studi menunjukkan bahwa lemahnya internalisasi nilai-nilai teologis Kristen dalam sistem birokrasi dan tata kelola institusi turut berkontribusi terhadap tingginya praktik korupsi. Korupsi sering kali terjadi seiring dengan absennya nilai kejujuran dan integritas sebagai wujud panggilan iman, lemahnya keadilan sebagai refleksi kasih terhadap sesama, serta tidak berfungsinya mekanisme pengawasan moral yang berakar pada hati nurani dan tanggung jawab di hadapan Tuhan.

Dalam perspektif etika Kristen, tindakan korupsi dipandang sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah dan standar moral Alkitab, sehingga menuntut integritas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada kepentingan umum dalam praktik pemerintahan.²² Selain itu, lemahnya penerapan etika Kristen dalam kehidupan publik menunjukkan bahwa nilai-nilai iman sering tidak diinternalisasi dalam praktik kerja dan pengambilan keputusan, sehingga memungkinkan praktik korupsi tetap berlangsung.²³

²⁰ Eko Sudarmanto et al., "Maqashid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention," *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 1 (March 2025): 38–50, <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.313>.

²¹ Yosefo Gule, "A Theological-Ethical Study of Church Against Corruption," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 2 (November 2022): 1910–20, <https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i2.263>.

²² Thian Rope, Stefanus Sujatmoko, and Juan Carlos, "RELEVANCE OF CHRISTIAN ETHICS IN ADDRESSING CORRUPTION AND SOCIAL JUSTICE ISSUES IN INDONESIA," *International Journal of Education and Literature* 2, no. 2 (July 2023): 01–13, <https://doi.org/10.55606/ijel.v2i2.68>.

²³ Friday Ifeanyi Ogbuehi, "Christian Ethics in a Corrupt Society: A Challenge to Christians in Nigeria," *UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities* 18, no. 2 (January 1970): 320–40, <https://doi.org/10.4314/ujah.v18i2.19>.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa agama, termasuk Kekristenan, memiliki sumber daya etis yang kuat untuk melawan korupsi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai tersebut diintegrasikan dalam sistem sosial dan kelembagaan.²⁴ Bahkan, tanpa dukungan sistem dan komunitas yang menegakkan nilai moral, religiositas saja tidak cukup untuk menekan perilaku koruptif.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dimensi teologis memiliki relevansi empiris dalam menjelaskan praktik korupsi sistemik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi sistemik tidak dapat dipahami semata sebagai deviasi individual, melainkan sebagai fenomena struktural yang berakar pada relasi kekuasaan, kelemahan institusional, dan budaya politik yang permisif terhadap penyalahgunaan kewenangan. Dalam perspektif sosiologi politik, temuan ini sejalan dengan argumen bahwa korupsi merupakan bagian dari mekanisme reproduksi kekuasaan yang memungkinkan elit mempertahankan dominasi melalui kontrol terhadap sumber daya publik.²⁶ Struktur yang lemah dalam hal akuntabilitas dan transparansi menciptakan ruang bagi terbentuknya jaringan korupsi yang bersifat self-reinforcing, sehingga memperkuat siklus korupsi yang sulit diputus. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa korupsi sistemik berfungsi sebagai “embedded practice” dalam sistem sosial, bukan sekadar penyimpangan dari norma.

Implikasi dari korupsi sistemik terhadap kepercayaan publik terlihat sangat signifikan, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi empiris yang menegaskan bahwa persepsi terhadap korupsi memiliki hubungan negatif yang kuat dengan tingkat kepercayaan terhadap institusi negara.²⁷ Penurunan kepercayaan ini tidak hanya berdampak pada legitimasi pemerintahan, tetapi juga pada efektivitas kebijakan publik dan stabilitas sosial. Dalam konteks ini, kepercayaan publik berfungsi sebagai modal sosial yang krusial dalam menjaga keberlanjutan sistem politik, sehingga erosi terhadap kepercayaan tersebut dapat memicu krisis legitimasi yang lebih luas. Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa persepsi korupsi juga berperan sebagai mediator yang

²⁴ Yahya Wijaya, “Constructing an Anti-Corruption Theology,” *Exchange* 43, no. 3 (September 2014): 221–36, <https://doi.org/10.1163/1572543X-12341325>.

²⁵ Heather Marquette, “Corruption, Religion and Moral Development,” in *Handbook of Research on Development and Religion*, ed. Matthew Clarke (Edward Elgar Publishing, 2013), <https://doi.org/10.4337/9780857933577.00020>.

²⁶ Nkosingiphile Mkhize and Danielle Nel-Sanders, “Corruption Risk as a Structural Driver of State Fragility: Examining the Governance Crisis in South Africa,” *Frontiers in Political Science* 7 (August 2025): 1575693, <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1575693>.

²⁷ Luca Andriani and Margarita Maria Escudero Loaiza, “Institutional Trust and Corruption: Evidence from Latin America,” *Revista Debates* 15, no. 1 (April 2021): 247–74, <https://doi.org/10.22456/1982-5269.112643>.

memperlemah hubungan antara keadilan sosial dan kepercayaan politik, yang menunjukkan kompleksitas relasi antara variabel-variabel tersebut.²⁸

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa korupsi memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan sosial, termasuk menurunnya partisipasi politik dan meningkatnya apatisme masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Studi empiris menunjukkan bahwa persepsi terhadap korupsi berkorelasi negatif dengan partisipasi politik, karena masyarakat cenderung kehilangan kepercayaan terhadap efektivitas keterlibatan mereka dalam sistem yang dianggap tidak adil.²⁹ Dalam konteks Indonesia, kondisi ini berpotensi memperlemah demokrasi substantif, karena partisipasi publik merupakan elemen penting dalam proses pengambilan keputusan yang inklusif. Selain itu, korupsi juga terbukti memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi, yang pada gilirannya memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara.³⁰

Dalam perspektif teologis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, amanah, dan integritas, yang memiliki dimensi moral dan spiritual yang mendalam. Konsep amanah dalam teologi menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan akuntabilitas, sehingga penyalahgunaan kekuasaan melalui korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap mandat tersebut. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa korupsi tidak hanya berdampak pada tatanan sosial, tetapi juga pada dimensi etis yang lebih luas. Dalam kerangka ini, nilai-nilai teologis berfungsi sebagai landasan normatif yang dapat digunakan untuk mengkritisi praktik korupsi sekaligus memberikan arah bagi reformasi moral dalam tata kelola pemerintahan.

Selain sebagai kerangka normatif, pendekatan teologis juga memiliki potensi transformasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Studi menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai etika dalam sistem tata kelola, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab moral, dapat meningkatkan kepercayaan

²⁸ "How Does Social Justice Affect Political Trust? The Mediating Role of Corruption Perception and the Moderating Role of Political Satisfaction," *Journal of Social Science and Humanities* 4, no. 9 (September 2022), [https://doi.org/10.53469/jssh.2022.4\(09\).07](https://doi.org/10.53469/jssh.2022.4(09).07).

²⁹ Mohamed Yusuf Ahmed, Abdulkadir Mohamed Abdullahi, and Hassan Abdikadir Hussein, "The Dual Impact of Corruption: How Perceptions and Experiences Shape Political Participation in Somalia – an Empirical Study," *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (December 2025): 2504130, <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2504130>.

³⁰ Masa Sylvester Motadi, "Corruption and the Public Money: The South African Perspective," *International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293)* 7, no. 2 (May 2025): 260–69, <https://doi.org/10.36096/ijbes.v7i2.779>.

publik terhadap institusi negara.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan reformasi struktural dengan internalisasi nilai-nilai moral memiliki potensi yang lebih besar dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, teologi tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap praktik korupsi, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi pembangunan sistem pemerintahan yang berintegritas.

Lebih jauh, perspektif teologi pembebasan memberikan dimensi kritis terhadap fenomena korupsi dengan menempatkannya sebagai bagian dari struktur ketidakadilan yang lebih luas. Korupsi dipahami sebagai bentuk penindasan struktural yang memperkuat dominasi kelompok elit dan memperlemah posisi kelompok marginal. Pendekatan ini sejalan dengan temuan bahwa korupsi berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan sosial dan memperburuk kondisi kelompok rentan.³² Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan reformasi kelembagaan, tetapi juga perubahan struktural yang lebih mendasar untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif.

Dalam konteks integratif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sosiologi politik dan teologi memiliki potensi untuk saling melengkapi dalam memahami dan mengatasi korupsi sistemik. Sosiologi politik memberikan kerangka analitis untuk memahami dinamika struktural dan institusional, sementara teologi menawarkan perspektif normatif dan transformasional yang berfokus pada nilai-nilai moral dan spiritual. Integrasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap fenomena korupsi, sekaligus membuka ruang bagi formulasi solusi yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga berbasis nilai. Dengan demikian, pendekatan interdisipliner ini dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan kajian korupsi serta dalam perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dan berkelanjutan.

³¹ Yaxin Zhang and Daxin Sun, "More Transparency, More Trust: EVIDENCE from Anti-corruption Campaign in CHINA," *Review of Development Economics* 29, no. 2 (May 2025): 1111–43, <https://doi.org/10.1111/rode.13160>.

³² Paolo Esposito et al., "Unveiling the Relationship Between Cultural Values and Public (Dis)Value: The Mediation Role of Corruption Perception and Citizen Trust," *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 32, no. 4 (July 2025): 4462–81, <https://doi.org/10.1002/csr.3192>.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi sistemik di Indonesia merupakan fenomena yang berakar kuat dalam struktur sosial, relasi kekuasaan, dan kelemahan institusional yang saling berkelindan, sehingga tidak dapat dipahami sebagai sekadar tindakan individual. Dalam perspektif sosiologi politik, korupsi muncul sebagai produk dari ketimpangan distribusi kekuasaan dan lemahnya mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan praktik penyalahgunaan kewenangan berlangsung secara terinstitusionalisasi. Kondisi ini berdampak langsung pada terjadinya disintegrasi kepercayaan publik, yang tercermin dalam menurunnya legitimasi lembaga negara, melemahnya partisipasi sosial, serta meningkatnya sikap apatis masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Di sisi lain, perspektif teologis menegaskan bahwa korupsi merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental seperti keadilan, integritas, dan amanah, sehingga tidak hanya memiliki implikasi sosial, tetapi juga dimensi moral dan spiritual yang mendalam.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual integratif yang menggabungkan pendekatan sosiologi politik dan teologi dalam menganalisis korupsi sistemik. Integrasi ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menghubungkan dimensi struktural dan normatif secara simultan, sehingga mampu menjelaskan akar permasalahan sekaligus menawarkan dasar transformasi nilai dalam tata kelola pemerintahan. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui reformasi kelembagaan dan kebijakan, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai-nilai etis dan spiritual dalam sistem sosial dan budaya organisasi. Dengan demikian, pendekatan interdisipliner ini membuka ruang bagi strategi penanganan korupsi yang lebih holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik.

Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan integrasi antara reformasi struktural dan transformasi moral dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pendekatan ini melalui studi empiris yang menguji secara langsung hubungan antara internalisasi nilai teologis dan tingkat kepercayaan publik dalam konteks kelembagaan tertentu. Selain itu, diperlukan eksplorasi lebih lanjut mengenai mekanisme implementasi nilai-nilai etis dalam sistem birokrasi modern, termasuk melalui pendidikan, kebijakan organisasi, dan penguatan budaya integritas, guna memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan berdampak nyata.

E. REFERENSI

- Ahmed, Mohamed Yusuf, Abdulkadir Mohamed Abdullahi, and Hassan Abdikadir Hussein. "The Dual Impact of Corruption: How Perceptions and Experiences Shape Political Participation in Somalia – an Empirical Study." *Cogent Social Sciences* 11, no. 1 (December 2025): 2504130. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2504130>.
- Akhtar, Rana Sharjeel, Muh Adrikni Al Hakim, Lutfiani Puspita Dewi, Ita Nuryana, and Dyah Maya Nihayah. *Governance Challenges and the Impact of Corruption on Socio-Economic Stability: A Literature Study in Developing Countries*. 42, no. 2 (2025).
- Andriani, Luca, and Margarita Maria Escudero Loaiza. "Institutional Trust and Corruption: Evidence from Latin America." *Revista Debates* 15, no. 1 (April 2021): 247–74. <https://doi.org/10.22456/1982-5269.112643>.
- Annisa, Neng Nur, and Maria Margarita R. Lavides. "The Impact of Corruption on Economic Stability and Community Life in Indonesia." *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik* 4, no. 1 (April 2025): 1–10. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v4i1.44798>.
- Arman, Md. Yasir Arafat, and Mohammad Faruq Azam. "Combating Corruption in Bangladesh: An Unexplored Framework in Anti-Corruption Strategies." *Journal of Arts, Humanities and Social Science* 2, no. 1 (April 2025): 194–203. <https://doi.org/10.69739/jahss.v2i1.463>.
- Cornell, Charles N. "Please Say It Clearly: A Reflection on Proper Style of Scientific Reporting." *HSS Journal®: The Musculoskeletal Journal of Hospital for Special Surgery* 17, no. 2 (July 2021): 128–29. <https://doi.org/10.1177/15563316211005401>.
- Esposito, Paolo, Emanuele Doronzo, Massimiliano Tufo, and Vincenzo Riso. "Unveiling the Relationship Between Cultural Values and Public (Dis)Value: The Mediation Role of Corruption Perception and Citizen Trust." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 32, no. 4 (July 2025): 4462–81. <https://doi.org/10.1002/csr.3192>.
- Gule, Yosefo. "A Theological-Ethical Study of Church Against Corruption." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 2, no. 2 (November 2022): 1910–20. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v2i2.263>.
- "How Does Social Justice Affect Political Trust? The Mediating Role of Corruption Perception and the Moderating Role of Political Satisfaction." *Journal of Social Science and Humanities* 4, no. 9 (September 2022). [https://doi.org/10.53469/jssh.2022.4\(09\).07](https://doi.org/10.53469/jssh.2022.4(09).07).
- Ismail, Audaraziq, Febby Mutiara Nelson, and Basuki Rekso Wibowo. "ABUSE OF POWER: UNDERSTANDING THE DYNAMICS OF CORRUPTION BY INDONESIAN GOVERNMENT AUTHORITIES." *Lex Localis - Journal of Local Self-Government* 23, no. 10 (July 2025): 595–604. <https://doi.org/10.52152/800756>.

- Koskey, Willy, James Nkansah Obrempong, and Sicily M. Muriithi. "An Examination of Theology's Influence on Societal, Political, and Economic Realities." *Journal of Sociology, Psychology and Religious* 5, no. 3 (June 2025): 19–33. <https://doi.org/10.70619/vol5iss3pp19-33>.
- Kurniawati, Wa Ode Intan, and Saprudin Saprudin. "Ethics in Indonesian Government Bureaucracy: Theoretical Foundations, Historical Evolution, and Contemporary Case Studies." *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study* 6, no. 1 (March 2025): 21–29. <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v6i1.588>.
- Marquette, Heather. "Corruption, Religion and Moral Development." In *Handbook of Research on Development and Religion*, edited by Matthew Clarke. Edward Elgar Publishing, 2013. <https://doi.org/10.4337/9780857933577.00020>.
- Masorong, Amyna Naphizah P. "ISLAMIC ETHICAL PRINCIPLES AND ACCOUNTABILITY IN GOVERNANCE." *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance* 7, no. 21 (March 2025): 21–34. <https://doi.org/10.35631/AIJBAF.721002>.
- Matić, Ivica. "Guidelines for Writing and Publishing a Scientific Paper." *Cardiologia Croatica* 17, nos. 9–10 (November 2022): 352–352. <https://doi.org/10.15836/ccar2022.352>.
- Mkhize, Nkosingiphile, and Danielle Nel-Sanders. "Corruption Risk as a Structural Driver of State Fragility: Examining the Governance Crisis in South Africa." *Frontiers in Political Science* 7 (August 2025): 1575693. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1575693>.
- Motadi, Masa Sylvester. "Corruption and the Public Money: The South African Perspective." *International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293)* 7, no. 2 (May 2025): 260–69. <https://doi.org/10.36096/ijbes.v7i2.779>.
- Ogbuehi, Friday Ifeanyi. "Christian Ethics in a Corrupt Society: A Challenge to Christians in Nigeria." *UJAH: Unizik Journal of Arts and Humanities* 18, no. 2 (January 1970): 320–40. <https://doi.org/10.4314/ujah.v18i2.19>.
- Paranata, Ade. "A Systematic Literature Review of Anti-Corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia." *Public Organization Review* 25, no. 3 (September 2025): 1181–214. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>.
- Polrendyo Polrendyo, Ika Devy Pramudiana, and Eny Haryati. "How 'Good' Governance in Indonesia? A Systematic Literature Review." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2, no. 5 (September 2025): 63–86. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i5.582>.
- Salma. "Indonesia's Corruption Perception Index Remains Low, UGM Expert Cites Weak Institutional Reform and Deep-Rooted Corruption Culture." *Universitas Gadjah Mada*, February 17, 2025. <https://ugm.ac.id/en/news/indonesias-corruption-perception-index-remains->

low-ugm-expert-cites-weak-institutional-reform-and-deep-rooted-corruption-culture/.

- Salsabila, Firda Nurjihan, Lilis Suminar, Yola Agustina, Yuni Sri Rezeki, and Muhammad Fikri Ramdhani. "DAMPAK SISTEMIK KORUPSI TERHADAP PEREKONOMIAN, SISTEM PENDIDIKAN, DAN PEMBAGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS KOMPREHENSIF." *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 1, no. 6 (November 2024): 210–20. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i6.2917>.
- Sayal, Maha A. "How Can I Write a Discussion That Is Effective?" *Journal of Language and Linguistics in Society*, no. 35 (July 2023): 7–10. <https://doi.org/10.55529/jlls.35.7.10>.
- Setyaningrum, Dyah, Ratna Wardhani, and A. Syakhroza. "Good Public Governance, Corruption and Public Service Quality: Indonesia Evidence." *International Journal of Applied Business and Economic Research* 15 (January 2017): 327–38.
- Sudarmanto, Eko, Junet Kaswoto, Warty Warty, Mamdukh Budiman, and Zubaidi Wahyono. "Maqashid Sharia as a Framework for Innovation in Corruption Prevention." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 4, no. 1 (March 2025): 38–50. <https://doi.org/10.54298/ijith.v4i1.313>.
- Tambunan, Derwin. "Indonesia under Threat: The Danger of Corruption to Political Legitimacy." *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 1 (March 2023): 112–40. <https://doi.org/10.1177/20578911221124965>.
- Thian Rope, Stefanus Sujatmoko, and Juan Carlos. "RELEVANCE OF CHRISTIAN ETHICS IN ADDRESSING CORRUPTION AND SOCIAL JUSTICE ISSUES IN INDONESIA." *International Journal of Education and Literature* 2, no. 2 (July 2023): 01–13. <https://doi.org/10.55606/ijel.v2i2.68>.
- Wafa, Moh Ali, Sudirman Abbas, and Umar Sulaiman. "The Law and Impact of Political Corruption on Community Trust In Political Parties In Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (March 2021). <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.20140>.
- Wijaya, Yahya. "Constructing an Anti-Corruption Theology." *Exchange* 43, no. 3 (September 2014): 221–36. <https://doi.org/10.1163/1572543X-12341325>.
- Yustia, Dewi Asri, and Firdaus Arifin. "Bureaucratic Reform as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 2023): 2166196. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2166196>.
- Zashikhina, I. M., and O. V. Pechinkina. "Scientific Publications Format IMRaD for Social and Humanities Research: A Chance to Be Heard." *Vyshee Obrazovanie v Rossii = Higher Education in Russia* 31, no. 10 (October 2022): 150–68. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-10-150-168>.

Zhang, Yaxin, and Daxin Sun. "More Transparency, More Trust: EVIDENCE from Anti-corruption Campaign in CHINA." *Review of Development Economics* 29, no. 2 (May 2025): 1111–43. <https://doi.org/10.1111/rode.13160>.